



Aplikasi

Kedua aplikasi ini sudah bisa diunduh lewat sistem operasi android.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta Tri Hastono menyatakan, hingga kini sudah ada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta yang terintegrasi dengan aplikasi JSS. Tak hanya itu, lanjutnya, JSS juga mulai merambah pelayanan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Tiap OPD dibentuk tim reaksi cepat untuk merespons aduan dan pelayanan lewat JSS. Target respon tidak lebih dari dua jam. Kalau belum selesai penanganan, setidaknya ada penyelesaian sementara.

Hanya saja, layanan JSS ini perlu internalisasi. Di mana setiap pihak terkait mulai dari OPD hingga kelurahan dan puncak pimpinan yang pertama harus tahu dan paham, bisa mengikuti operasional dan prosedur JSS.

"Ini perlu waktu untuk bisa terinternalisasi secara penuh agar semua pihak itu tidak hanya paham tapi juga bisa mengikuti proses administrasi dan teknisnya. Perlu proses internalisasi karena JSS ini adalah sistem besat yang mengikat OPD hingga tingkat wilayah," terang Tri Hastono. Dia menjelaskan, tidak semua OPD

harus memiliki akses layanan JSS. Beberapa layanan yang belum terintegrasi di JSS misalnya di Dinas Perhubungan seperti uji layak jalan kendaraan atau KIR. Sedangkan di tingkat Puskesmas terkait layanan kepada pasien yang selama ini sudah memiliki satu sistem tapi masih *offline*. Kedua layanan itu tengah dikaji Diskominfosan Kota Yogyakarta agar terintegrasi di JSS.

"Pada tahap awal JSS ini layanan yang kita pilih adalah layanan yang sudah familiar dan saat dari proses manual kita geser ke digital tidak menimbulkan dampak kontraksi yang ekstrem. Dalam layanan publik di JSS saat diberlakukan kita tidak menampatkan kesiapan 100 persen di depan. Tapi kesiapan itu dibentuk dan dibangun menyamping saat JSS berjalan," tuturnya.

Untuk layanan publik di kecamatan dan kelurahan melalui JSS ditegaskan secara teknis sudah bisa diakses karena regulasinya sudah ada. Pelayanan JSS menerapkan basis data yang berjalan dan hanya datang ke tempat pelayanan saat mengambil produk layanan maupun membawa syarat lainnya, sehingga mengurangi beban waktu warga yang mengakses pelayanan. Namun sejauh ini dia menye-

but akses di JSS yang paling banyak masih pada kanal aduan masyarakat. Untuk pelayanan publik lainnya di JSS belum terlalu signifikan.

"JSS ini menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Kami tidak menutup pelayanan publik manual yang selama telah berjalan misal warga yang datang ke tempat pelayanan. Tapi nantinya masyarakat akan menggunakan JSS ketika sudah merasakan manfaatnya yang lebih sederhana dan tidak menyita waktu," ujar Tri.

Perbaikan Layanan

Awal Juli ini Pemkab Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul meluncurkan sebuah aplikasi berbasis android bernama Lapor Bantul. Lapor Bantul yang digadang-gadang sebagai pen jembatan antara masyarakat dan Pemkab ini terus dilakukan pembenahan.

Kepala Diskominfo Bantul, Nugroho Eko Setyanto mengatakan, secara umum aplikasi ini sudah sangat siap digunakan oleh masyarakat. Bahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan sudah terintegrasi. Sehingga laporan masyarakat bisa direspons dengan baik.

Nugroho mengakui pada saat peluncuran dua pekan lalu pihaknya masih

Sambungan halaman 1

melakukan beberapa penambahan dan perbaikan dalam aplikasi yang dapat diunduh melalui Googleplay atau Playstore tersebut. Namun beberapa hari terakhir aplikasi ini sudah siap secara keseluruhan. Meski begitu pihaknya menargetkan sebanyak 75 pemerintah desa di wilayahnya juga akan terintegrasi. Hanya saja hal ini membutuhkan proses yang cukup panjang karena pihaknya tengah menyusun bersama pemerintah desa terkait konten dan beberapa bentuk yang akan ditampilkan dalam aplikasi.

"Semoga tahun ini semua desa bisa terintegrasi," harapnya.

Menurut Nugroho, dalam aturannya setiap laporan yang masuk dari masyarakat harus dijawab paling lama 8x24 jam setelah laporan masuk oleh OPD terkait. Namun untuk laporan yang bersifat kedaruratan akan dijawab dan direspons secepatnya. Termasuk laporan yang bersifat keluhan terhadap pelayanan.

Dalam pengembangannya aplikasi ini akan dilengkapi dengan titik koordinat laporan. Sehingga saat ada laporan, penanganannya pun akan lebih cepat. "Contohnya jika ada kejadian darurat, dengan titik koordinat itu BPBD bisa lebih cepat sampai ke lokasi," sebutnya. (Tri C-1/Son)-m



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005